

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT *RURAL INFRASTRUCTURE
SUPPORT* (RIS-PNPM) MANDIRI DI KECAMATAN KUANTAN
HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 (S1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Pekanbaru**



OLEH :

**ALWIRI YOVI
NIM. 0801134067**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

Alwiri Yovi That The Analysis Of The Implementation Of Rural Infrastructure Support (Ris-Pnpm) Mandiri Program Independent Downstream Sub Kuantan Kuantan Singingi District Was Less Well In Practice. under the guidance of **Hery Suryadi, S.Sos, M.Si**

in support of poverty alleviation in rural areas, the ministry of public works by the directorate general of copyrighted works have been implementing various programs. including, subsidy reduction compensation program in the field of fuel oil in 2005 for rural infrastructure, rural infrastructure support in 2006, rural infrastructure development program which began in 2007 until 2011 and RIS-RIS-PNPM independent starting in 2009 until 2011.

rural infrastructure support national community empowerment program (RIS-PNPM), known as self-RIS-PNPM is a self empowerment program under the umbrella of self PNPM. This program seeks to create and improve the quality of people's lives, both individually and collectively through participation in solving a variety of problems related to poverty and underdevelopment of the village in an effort to improve the quality of life, independence and prosperity.

study sites are some of the villages in the district kuantan downstream, while the village is Lumbok, Pengalihan, Koto Rajo, the village Danau. election of four villages is to see a comparison of the implementation of community development programs RIS-PNPM independent downstream sub kuantan Kuantan Singingi District.

that the analysis of the implementation of RIS-PNPM program independent downstream sub kuantan Kuantan Singingi District was less well in practice. it can be seen from the results of the analysis of the responses recapitulation implementation of RIS-PNPM independent sub-districts downstream kuantan Kuantan Singingi, ie as many as 26 people respondents (55.31%) who responded "not good", and 13 respondents (27,67%) that responded "not good", the next eight respondents (17.02) that provide "good".

Key Word : Efektivitas, Efisiensi, Analisis Pelaksanaan Program RIS-PNPM Mandiri.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan sebagian dari Pembangunan Nasional yang tidak lepas dari prinsip-prinsip Otomoni daerah. Daerah diberikan kebebasan dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan terutama menyangkut kepentingan masyarakat. Pemberian Otomoni kepada daerah bertujuan agar daerah dapat melakukan peraturan terhadap rumah tangganya sendiri disamping untuk meningkatkan sumber daya guna penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan daerah tentunya dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Hal ini dikarenakan kemiskinan di pedesaan adalah merupakan persoalan rakyat di Indonesia. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat guna peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari perangkat pemerintah daerah serta dari berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut hendaknya dapat dilaksanakan oleh aparatur negara yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas program pemberdayaan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui kemampuan aparaturnya pemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut perlu adanya evaluasi, yaitu penilaian terhadap aktifitas program pemberdayaan baik mulai dari perencanaan sampai kepada berakhirnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Evaluasi disini penting artinya dengan adanya penilaian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan rencana yang ingin digariskan melalui program pemberdayaan masyarakat dapat dicapai sesuai dengan tujuan.

38,6 juta penduduk Indonesia adalah penduduk miskin. Sekitar 65% dari penduduk miskin tersebut bermukim di Pedesaan (sumber BPS: 2008). Rendahnya akses terhadap pelayanan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya, merupakan salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan. Untuk mengurangi pertumbuhan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin pedesaan, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya, Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2011 dan RIS-RIS-PNPM Mandiri yang dimulai pada tahun 2009 sampai 2011.

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Diantaranya adalah program Komensasi Pengurangan Subsidi –Bahan Bakar Minyak di bidang Infrastruktur Perdesaaan (PKPS-BBM IP) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RSIP) pada tahun 2007 sampai 2011 dan RIS-PNPM Mandiri yang dimulai tahun 2009 sampai 2011.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah **“Bagaimana Pelaksanaan Program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir dan Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- Untuk menganalisis Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat RIS-PNPM Mandiri yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor apa saja penghambat RIS-PNPM Mandiri yang dilakukan di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian:

- Untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada pihak-pihak atau instansi terkait dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat RIS-PNPM Mandiri di masa mendatang dalam rangka mendorong dan upaya meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

- Sebagai bahan masukan, informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
- Menambah wawasan penulis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

D. TINJAUAN TEORITIS

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak

untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; dan
 - d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :
 - a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - c. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- e. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
- f. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

3. Sistem Keuangan Negara, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- f. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- h. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; dan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah beberapa desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir, adapun desa tersebut adalah Lumbok, Pengalihan, Koto Rajo, Desa Danau. Pemilihan keempat desa adalah untuk melihat perbandingan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan Proposive Random Sampling yaitu penentuan sampel ini berdasarkan pertimbangan bahwa populasi yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat dan mengetahui langsung program RIS-PNPM Mandiri. Key informan disini adalah: Camat, Kepala Desa Danau, Kepala Desa Lumbok, Kepala Desa Pengalihan, Kepala Desa Koto Rajo, Pengurus OMS (Organsasi Masyarakat Setempat).

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas maka data yang diperlukan adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan juga buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Buku Pedoman Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri.
2. Petunjuk teknis operasional tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RIS-PNPM) Mandiri Pedesaan.
3. Panduan Kelembagaan dan Pengembangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- Studi Lapangan, dengan maksud untuk mendapatkan data primer melalui:
 - a. Observasi
Pengumpulan data dengan cara turun kelapangan untuk melihat secara langsung bantuan yang diberikan pemerintah melalui program RIS-PNPM Mandiri dan pemeliharannya.
 - b. Kuisisioner
Yaitu tehnik pengambilan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara sistematis disertai beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan responden.
 - c. Wawancara
Dengan mengadakan wawancara, tanya jawab dengan responden guna mendapatkan data pendukung dalam penelitian.

- Studi Kepustakaan, studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna dalam perumusan teori dan landasan bagi penganalisaan data primer serta untuk menelaah literatur yang tersedia.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pelaksanaan program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ternyata kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Analisis pelaksanaan program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yakni sebanyak 26 orang responden (55,31%) yang memberikan tanggapan “kurang baik”, dan 13 orang responden (27,67%) yang memberikan tanggapan “tidak baik”, selanjutnya 8 orang responden (17,02%) yang memberikan tanggapan “baik”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Analisis program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1. Kurangnya Sosialisasi** : sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan, di dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sosialisasi merupakan dasar keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi yang baik akan mempermudah dalam mencapai tujuan. Masyarakat sebagai objek utama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus mengetahui dan memahami tentang program apa yang sedang dijalankan, karna apabila sosialisasi tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi masalah-masalah seperti halnya kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya respon masyarakat, dan akan ada kemungkinan terjadinya penyalah tafsiran tentang

program yang sedang dilaksanakan. Hal ini berpengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya program yang akan dijalankan.

2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) : sumberdaya manusia sangat mempengaruhi terhadap pencapaian suatu tujuan, di dalam pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri di masyarakat harus memiliki sumber daya yang baik, maksudnya para pengelola kegiatan harus memiliki pengetahuan yang bagus dan mampu memenej dengan baik semua kegiatan yang akan di jalankan, selain itu pihak pengelola kegiatan juga harus mampu memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

3. Struktur birokrasi : di dalam setiap organisasi yang baik pasti di di pengaruhi oleh struktur organisasinya. Struktur organisasi yang baik iyalah adanya kejelasan dalam penempatan bagian dan pembagian kerja yang jelas. Di dalam RIS-PNPM Mandiri juga terdapat struktur yang telah di tetapkan berdasarkan petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri, seharusnya di setiap bagian harus terjalinnya kerjasama dan pembagiaan tugas yang jelas, namun kenyataannya diKecamatan Kuantan Hilir pelebagaan pengurus kegiatan masih belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan pembagian kerja juga masih kurang jelas. Struktur kelembagaan di dalam pengelolaan RIS-PNPM Mandiri.

- Efektifitas, faktor penghambatnya adalah :

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan PNPM Mandiri kurang sesuai dengan buku petunjuk teknis yang telah dibuat, hal ini dikarenakan kurangnya

penguasaan dan pemahaman pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri terhadap buku petunjuk teknis tersebut.

Kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri kepada masyarakat.

- Efisiensi, faktor penghambatnya adalah :

Kurangnya kemampuan pelaksana RIS-PNPM Mandiri dalam membuat perencanaan, baik perencanaan pembangunan sarana dan prasarana maupun simpan pinjam.

Jadwal pelaksanaan PNPM Mandiri sering terjadi penundaan, karena kurangnya perencanaan.

- Kecukupan, faktor penghambatnya adalah :

Pelaksanaan PNPM Mandiri kurang sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat.

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga dana yang disetujui kurang sesuai dengan dana yang disalurkan.

- Pemerataan, faktor penghambatnya adalah :

Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, terutama yang bersifat simpan pinjam tidak semua masyarakat miskin yang memperoleh pinjaman tersebut.

Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, yang berupa pembangunan sarana dan prasarana, tidak semua masyarakat dapat menikmatinya, dengan alasan dana yang terbatas.

- Responsivitas, faktor penghambatnya adalah :

Kurangnya respon dari masyarakat tentang pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, hal ini dikarenakan masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri tidak melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaannya.

- Ketepatan, faktor penghambatnya adalah :

Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri kurang tepat waktu dengan pelaksanaannya, baik dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun simpan pinjam, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program tersebut.

Pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri baik berupa pembangunan sarana dan perasarana maupun simpan pinjam ternyata kurang tepat sasaran, seperti pembangunan mushola yang jarang digunakan masyarakat karena sudah adanya mesjid yang cukup memadai dilingkungan desa tersebut, begitu juga halnya dalam pelaksanaan program simpan pinjam ternyata tidak tepat sasaran, yakni masih banyaknya masyarakat yang tergolong miskin tidak menerima simpan pinjam tersebut.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bahwa Analisis pelaksanaan program RIS-PNPM Mandiri di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ternyata kurang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat diketahui dari hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai Analisis pelaksanaan program RIS-PNPM Mandiri di

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yakni sebanyak 26 orang responden (55,31%) yang memberikan tanggapan “kurang baik”, dan 13 orang responden (27,67%) yang memberikan tanggapan “tidak baik”, selanjutnya 8 orang responden (17,02%) yang memberikan tanggapan “baik”.

2. Saran

Agar adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, mengadakan musyawarah desa mengenai pelaksanaan RIS-PNPM Mandiri, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana maupun program simpan pinjam kepada masyarakat.

Agar para pengurus dan pengelola kegiatan harus memiliki sumberdaya manusia dan memiliki pengetahuan serta mental yang baik agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. 1998. *Public Policy Making*. London: Nelson.
- Bintoro, Tjokroami Djojo. 1990. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Dunn, Willian N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Hanindita Graha Widya.
- David. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Direktur Jendral Cipta Karya, 2010. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*, tahun 2010.

- Dye, Thomas R. 1998. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Nugroho, Riant & Wrihatnolo, Randi R. 2003. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Alex Media Kompotindo.
- Edward, C. George III. 1990. *The Policy Predicament*. Washington: Congressional Quarterly.
- Friedman. 1992. *Democracy and Public Service*. Oxford University Press.
- Ginanjjar, kartasismita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat*. Jakarta: Pustaka.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- I Nyoman, Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Kebijaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Rural Infrastructure support (R. IS-PNPM) Mandiri*. Direktorat Jendral Cipta Karya, Jakarta
- Moebiyarto. 1996. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengkuan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Ndraha, Talidzuhu. 2000. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prabu, Anwar Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung: Aditama.
- Siagian, S.P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetandyo. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: Pustaka Pesantren.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Pubik*. Yogyakarta: Media Pressindo.